

Memahami Jurnalisme pada Era Digital

Understanding Journalism in the Digital Age

Djoko Waluyo

Peneliti Puslitbang Aptika IKP, Badan Litbang SDM
Puslitbang Aptika dan IKP, Badan Litbang SDM, Kementerian Kominfo
Jln. Merdeka Barat No. 9 Jakarta
djok016@kominfo.go.id

Dikirim: 25 April 2019 Direvisi: 25 Mei 2019 Disetujui: 15 Juni 2019

Abstract

This article reviews about understanding journalism in the digital era, where the influence of developments in information and communication technology has changed the meaning and understanding of people about journalism. The presence of the Internet that is used in journalism activities has been able to present information dissemination quickly. As well as journalists in finding, processing and distributing information in the form of news and images, they have been able to get to remote areas quickly, precisely and instantly. Conventional media is increasingly being abandoned, but its presence is still needed. Whereas new media and cyber media are complementary for the community to fulfill their information needs. The way work of journalists also changes in the digital era. Thus, users or news readers can easily access information from a sophisticated set of computer or smartphone devices.

Keywords: Journalism, Internet, Digital era

Abstraksi

Artikel ini mengulas tentang memahami jurnalisme pada era digital, dimana pengaruh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah merubah makna dan pemahaman orang mengenai jurnalisme. Kehadiran Internet yang dimanfaatkan dalam aktivitas jurnalisme telah mampu menyajikan penyebaran informasi dengan cepat. Serta wartawan dalam mencari, mengolah dan distribusi informasi berupa berita dan gambar, telah mampu sampai ke pelosok daerah dengan cepat, tepat dan seketika. Media konvensional makin ditinggalkan, namun masih tetap diperlukan kehadirannya. Sedangkan media baru dan media siber menjadi komplementer bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan informasinya. Cara kerja wartawan juga berubah dalam era digital. Dengan demikian, pengguna atau pembaca berita dapat dengan mudah mengakses informasi dari seperangkat alat komputer atau smartphone yang canggih.

Kata kunci: Jurnalisme, Internet, Era digital

I. PENDAHULUAN

Dunia komunikasi dan informatika dewasa ini sedang berubah. Pemberitaan melalui media cetak surat kabar dan media penyiaran televisi dan radio sudah dianggap sebagai media konvensional, dengan kategori media masa lalu. Terutama surat kabar sudah mulai ditinggalkan orang untuk membacanya. Masyarakat membaca berita melalui media siber atau portal berita yang dengan mudah diakses dalam *smartphone*.

Alvin Toffler menyebut era baru dewasa ini dengan *The Third Wave* atau gelombang ketiga, yang artinya menegaskan saat ini peradaban manusia telah memasuki era bahwa fungsi informasi menjadi jauh lebih penting daripada era sebelumnya. Pada era baru ini telah muncul media baru seperti Internet.

Rahardjo (2011) mengatakan bahwa keberadaan media baru tidak bisa dilepaskan dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat. Aktivitas jurnalisme dengan hadirnya Internet telah memanfaatkan jaringan Internet untuk mencari, mengolah dan mengirimkan informasi atau berita-berita sebagai produk jurnalisme. Orang menyebutnya dalam kegiatan jurnalisme melalui Internet sebagai bentuk jurnalisme online atau dapat juga sebagai media digital. Artinya, produk jurnalisme kemudian disebarluaskan melalui jaringan Internet ke pelosok dunia. Bahkan disebut pula bahwa kehadiran Internet telah menjadi sosok baru yaitu sebagai media baru (*new media*),

menurut Martin Lister, dalam bukunya *New Media: a critical introduction* (London and New York, 2009), dengan beberapa karakteristik: bersifat digital, interaktif, hypertehtual, virtual, berjaringan (networked) dan simulated.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (*information and communication technology*) sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Kegiatan lembaga public maupun institusi swasta dan pelbagai organisasi, makin luas menggunakan perangkat maupun jaringan teknologi informasi dan komunikasi. Internet sebagai suatu bentuk media baru, telah menyajikan berbagai kemudahan untuk mengakses informasi, data, maupun gambar dalam proses komunikasi. Barker (dalam Lukas Batmomolin, 2003: 16) menegaskan bahwa komunikasi itu sendiri pada hakikatnya merupakan suatu proses yang dinamis, sebagai suatu proses yang selalu berubah dan tidak pernah selesai. Dengan demikian komunikasi itu dinamis dan selalu berubah karena kaya makna.

Internet sebagai suatu komunikasi yang berlangsung melalui sarana atau media komunikasi yang diciptakan, dirancang secara khusus untuk mencapai sebanyak mungkin orang. Sebab itu, komunikasi yang termediasi dapat cenderung bersifat massal, baik dalam transmisinya atau jaringan maupun dampak-dampaknya yang ditimbulkannya. Dalam realitas sosial pelbagai macam sarana komunikasi yang disajikan dalam tampilan layar, mampu mempesona khalayak sehingga makin luas

pemanfaatannya. Perkembangan sarana komunikasi dengan tampilan layar ini makin lama dapat membentuk sikap budaya masyarakat. Budaya dan komunikasi tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain sebab budaya bukan hanya menentukan siapa berbicara kepada siapa, tentang apa dan bagaimana komunikasi itu berlangsung. Budaya juga membantu untuk menentukan bagaimana penerima komunikasi menyandi pesa-pesan yang ditangkap, makna yang diberikan kepada pesan serta kondisi dan latarbelakang dalamnya berbagai pesan dapat atau tidak dapat dikirim, diterima atau diinterpretasikan. Kenyataannya seluruh aktivitas komunikasi bergantung pada budaya didalamnya, dengan demikian, menurut Porter dan Samovar, (dalam Lukas Batmomolin, 2003: 26) bahwa budaya merupakan dasar bagi komunikasi. Sebab itu di mana ada perbedaan dalam hal budaya, ada juga perbedaan dalam cara berkomunikasi. Dengan demikian akan terbentuk budaya-media yang menjelaskan satu fenomena tertentu dalam perkembangan industry komunikasi.

Douglas Keller menjelaskan bahwa budaya media sebagai suatu bentuk budaya tekno (*techno-culture*) yang menggabungkan budaya dan teknologi ke dalam bentuk-bentuk konfigurasi baru. Perpaduan ini menghasilkan tipe masyarakat yang didalamnya media dan teknologi menjadi prinsip yang mengorganisasi. Budaya media kemungkinan juga dengan kata lain seperti *screen culture* adalah sebuah budaya berteknologi

tinggi (*high-tech culture*) karena mempergunakan teknologi termutakhir.

Fenomena bentuk budaya media tersebut kini makin kuat berkembang dalam masyarakat perkotaan terutama, yang cenderung terus makin luas melanda juga pada masyarakat di perdesaan di Tanah Air. Dan budaya media ini juga telah masuk untuk kegiatan jurnalisme melalui media konvensional maupun media online atau portal berita yang disebut juga sebagai media siber.

Perkembangan media baru dalam era reformasi ini sangat pesat. Dari perspektif teori media, dapat diamati media yang dapat dikelompokkan pada media paradigma komersial dan kelompok media yang berparadigma publik. Dalam kajian teoritik kedua paradigma media dapat dilakukan analisis kualitatif dengan mendalam, namun dalam realitas sosialnya sulit untuk dibedakan dengan tegas.

Media dengan paradigma publik menjalankan jurnalisme media publik yang mengutamakan informasi faktual berkonteks kehidupan publik. Jurnalisme dengan format media publik lebih banyak dijalankan oleh media mainstream atau yang punya pengaruh kuat dalam masyarakat. Dalam kehidupan sosial, secara normative media melaksanakan fungsi-fungsi informasi, pendidikan, hiburan dan kritik sosial.

Meskipun tidak semua fungsi dijalankan secara merata namun keempat fungsi itu yang menjadikan media tersebut

obyektif atau tidak, berpihak kepada publik atau berpihak ke arah komersial.

Artikel ini meninjau pemahaman jurnalisme yang dewasa ini telah memanfaatkan jaringan Internet untuk kegiatannya. Memahami jurnalisme yang berkembang dalam konteks era digital dan kebebasan pers yang dipraktikkan media berparadigma media publik dan media komersial yang menghadapi tantangan tidak ringan. Dalam arti konsep jurnalisme perlu direvisi sebab pengaruh kehadiran internet dalam aktifitas jurnalistik media. Serta kecenderungan wartawan menyusun berita yang berpedoman rumus berita yang tepat, akurat dan cepat. Fakta-fakta yang dideskripsikan bersumber dari perkembangan media di Tanah Air. Sumber data tinjauan artikel menggunakan hasil studi kepustakaan dengan analisis deskriptif-kualitatif. Diharapkan tujuan artikel ini dapat memberi wawasan dan informasi pengetahuan yang lebih luas terkait dengan perkembangan jurnalisme dewasa ini. Serta dapat dijadikan pedoman praktis bagi jurnalis, kalangan peneliti bidang komunikasi dan mahasiswa fakultas ilmu komunikasi untuk mendalami lebih lanjut mengenai perkembangan jurnalisme dalam era digital.

II. PEMBAHASAN

A. Media Baru

Dalam pengertian yang populer, karakteristik media baru (Romli, 2012), dengan fokus pada media online mempunyai keunggulan dibandingkan media konvensional, antara lain: (1) media online bersifat multi media yaitu dapat memuat atau menyajikan berita/ informasi dalam bentuk teks, *audio, video*, grafis dan gambar secara bersamaan; (2) Aktualitas, berisi info aktual/terbaru karena kemudahan dan kecepatan penyajiannya; (3) Cepat, begitu di posting atau diupload, langsung seketika dapat diakses semua orang; (4) *Update*, proses pembaruan (updating) informasi dapat dilakukan dengan cepat, baik dari sisi konten maupun redaksional, misalnya kesalahan ketik atau ejaan, dan belum menemukan istilah "ralat" di media online sebagaimana sering muncul di media cetak. Informasi pun disampaikan secara terus menerus; (5) Kapasitas luas, di mana halaman web bisa menampung naskah sangat panjang; (6) *Fleksibilitas*, pemuatan dan *editing* naskah bisa kapan saja dan di mana saja, juga jadwal terbit (*update*) bisa kapan saja setiap saat; (7) Luas, menjangkau seluruh dunia yang memiliki akses internet. (8) Bersifat interaktif, dengan adanya fasilitas kolom komentar dan *chat room*; (9) Terdokumentasi, informasi tersimpan di "bank data" (arsip) dan dapat ditemukan melalui "link", "artikel terkait", dan fasilitas "cari" (*search*); (10) *Hiperlinked*, terhubung dengan sumber lain (*links*) yang berkaitan dengan informasi tersaji.

Demikian karakteristik dan keunggulan media baru terutama media online yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan jurnalisme dewasa ini pada era digital. Namun demikian, relasi media dengan masyarakatnya masih menjadi landasan kuat untuk eksistensi dan beroperasinya media dalam masyarakat.

Dalam perspektif teori komunikasi, bahwa relasi atau hubungan media dengan masyarakat pada hakikatnya sulit dipisahkan. Media dapat tumbuh dan berkembang didalam masyarakat yang menjadi habitatnya. Meskipun demikian, media terpisah kedudukannya dalam masyarakat. Media mempunyai aturan dan tindakannya sendiri. Bahkan media harus memiliki batasan (ruang lingkup) yang jelas terhadap masyarakat yang lebih luas.

Relasi media dengan masyarakat, akan memberi corak media tersebut beroperasi, dengan demikian tergantung pada waktu dan tempat dimana media itu berada. Media yang beroperasi pada suatu negara akan mengambil corak dari sistem politik yang dianut negara tersebut. Dominick menegaskan bahwa sistem politik negara menentukan kepastian hubungan yang nyata antara media dan pemerintah (dalam Elvinaro Ardianto, 2004: 154). Peran media di negara-negara demokrasi moderen dengan sistem informasi yang terbuka menganut pasar bebas (*free market*) atau sistem pasar campuran yang terintegrasi ke dalam struktur ekonomi dan politik internasional, tentunya berbeda

dengan negara-negara yang menganut sistem politik sosialisme atau masyarakat yang lebih religius.

Perkembangan media di berbagai negara memiliki sejarah yang berbeda-beda. Di negara-negara berkembang yang berhasil mencapai kemerdekaannya sendiri, media berperan untuk menggerakkan rasa nasionalisme dan anti kolonialisme, seperti di Indonesia. Namun dalam perkembangan media dewasa ini, menurut teori-teori media barat telah menjadi bagian hegemoni global dalam studi mengenai media. Faktor-faktor perbedaan perkembangan ekonomi,kebudayaan dan juga sejarah media,telah menjadi media-media Barat berbeda dengan negara-negara lain. Studi komunikasi massa tidak dapat menghindarkan diri dari hal-hal yang terkait dengan nilai-nilai (*values*) dan konflik politik dan sosial.Media massa mau tidak mau terlibat dalam konflik ini karena media bertindak sebagai pembuat dan penyebar makna (*meaning*) atas peristiwa atau konflik yang terjadi dengan kehidupan pribadi dan sosial.

Media yang telah mempunyai perjalanan panjang beroperasi dalam suatu sistem politik tertentu, diantaranya dapat dikatakan sebagai media yang telah mapan. Manajemen redaksi dan korporasi dari sisi organisasi media juga telah teruji dalam perjalanan waktu yang panjang cukup terjamin dan masih eksis sebagai suatu media. Media demikian telah mempunyai paradigma tertentu. Politik redaksional atau kebijaksanaan pemberitaan telah diterapkan sejak media itu terbit pertama kali,

dan dilakukan evaluasi yang kemudian mengalami proses pemantapan sebagai suatu paradigma media yang diyakini oleh pengelola media tersebut. Dengan demikian, paradigma media adalah sikap dan pandangan politik redaksi terhadap pemberitaannya.

Pelaksanaan kebebasan pers di tanah air dalam masa Orde Baru, diantaranya dihambat dengan kompleksitas birokrasi pemerintah maupun birokrasi media. Dalam birokrasi media, terjadi hirarkhi pengelola media disusun bertingkat mulai dari reporter yang mencari dan menulis berita hingga ke desk berita dan selanjutnya keputusan pemuatan berita menjadi tanggung jawab pemimpin redaksi. Birokrasi media yang kompleks dapat menjadi hambatan secara tidak sadar terhadap penyajian berita-berita yang dibutuhkan publik. Di lain sisi, posisi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya berada dalam tekanan penguasa. Dan berkembang "budaya telepon" yakni pihak militer atau penguasa mendikte materi apa yang bisa disajikan sebagai berita dalam media. Dengan demikian, pemaknaan kebebasan pers oleh wartawan berarti penekanan, dan pembatasan ruang gerak jurnalisme. Realitas pelaksanaan kebebasan pers yang terjadi pada masa Orde Baru, dengan tekanan represif dari penguasa terhadap media maupun jurnalisnya, bahkan melalui organisasi wartawan ketika itu yaitu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Kondisi pelaksanaan kebebasan pers ternyata bahwa negara sebagai suatu kekuatan dominan telah memasuki ruang publik . Informasi publik melalui media pers telah dimanipulasi atau di konstruksi untuk kepentingan media. Media sebagai sarana propaganda penguasa, diantaranya untuk sarana kampanye program pembangunan ekonomi, yang pada masa Orde Baru dapat tumbuh dengan baik, namun kenyataannya fundamental ekonomi nasional sangat rapuh dengan diterpa gejolak krisis ekonomi dunia tahun 1997/1998.

Pendapat senada mengenai corak pemerintahan Orde Baru, menurut pengamat media dari Pusat Penelitian Asia, Universitas Murdoch, Australia, Krishna Sen dan David T.Hill (2001:3) merupakan bentuk otoritarian pemerintah Indonesia sejak 1966. Orde ini menggantikan Demokrasi Terpimpinnya Sukarno yang bercirikan kepemimpinan kharismatik presiden dan perdebatan ideologi yang intens. Atas nama perbaikan tatanan dan stabilitas, Orde Baru secara efektif melarang kegiatan dan bahkan perdebatan politik.

Adapun sejarah perjuangan politik untuk memperoleh kebebasan pers telah dimulai oleh Amerika Serikat sejak mencapai kemerdekaannya. Di Amerika Serikat, Amandemen Pertama Konstitusi menjamin kebebasan pers yang pada pokoknya menyebutkan bahwa ” Kongres tidak boleh membuat undang-undang yang akan mengurangi kebebasan berbicara atau pers” Kebebasan pers bisa hidup bukan saja karena ia

dikomodifikasi menjadi hukum. Kebebasan pers hidup dan berkembang karena rakyat Amerika menghargainya. Mereka menghargai kebebasan pers karena pers yang bebas memegang peranan besar dalam pembentukan bangsa dan mengangkat bangsa ini ke posisinya sebagai pemimpin dunia dalam demokrasi dan hak asasi manusia (Lorne W.Craner, 2006:2). Dengan demikian landasan filosofis dan hukum dari kebebasan pers bertumpu pada Amandemen Pertama (*The First Amandemen*).

Dalam pertumbuhan dan perkembangan dinamika sosial politik dunia, masalah kebebasan pers terus menjadi perhatian banyak negara. Salah satu faktor yang besar berupa inspirasi dari filosofi kebebasan pers dari negara Amerika, maka badan dunia Perserikatan Bangsa-bangsa mengukuhkan landasan kebebasan pers, diantaranya, dalam Piagam Hak-hak Asasi Manusia (*Declaration of Human Right*).

Pandangan masyarakat Amerika amat kuat bahwa hak pers untuk secara bebas menerbitkan, mengemukakan pendapat, mengkritik dan memberikan informasi adalah prinsip dasar demokrasi Amerika. Disini wartawan sebagai bagian penting dalam sistem media harus mempunyai profesionalisme yang terlatih untuk meliput berita secara obyektif dan adil. Dalam Piagam Hak-hak Asasi Manusia Dunia, sangat menjunjung tinggi dan menghargai hak pers yang bebas.

Di Indonesia, kebebasan pers yang dikembangkan saat ini adalah kebebasan pers dalam konteks pembangunan demokrasi

yang sehat. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945 harus dijamin. Pasal 28 menyatakan:

”Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Kemudian lebih jauh dalam Amandemen UUD 1945 tentang pasal 28F:

”Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Selanjutnya konsideran menyatakan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran,

memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya memerlukan kondisi sosial yang bebas. Artinya tugas jurnalisme wartawan sangat dipengaruhi oleh kondisi kebebasan pers dalam masyarakat. Kebebasan pers yang sehat dapat mendorong menuju pada tatanan masyarakat yang demokratis. Prasyarat tumbuhnya suatu negara demokrasi, diantaranya adanya kondisi kebebasan pers yang luas dalam masyarakat dan negara tersebut. Serta terdapat ruang publik yang terbuka dalam media yang bebas. Transparansi dalam dunia global yang demokratis, media dituntut juga berperan sebagai forum publik untuk lebih banyak memberitakan kepentingan publik, kritik dan juga menyalurkan aspirasi publik.

Dimensi kebebasan pers menjadi ukuran agar peliputan maupun pemberitaan media menjadi obyektif dan sesuai dengan sembilan elemen jurnalisme yang dianjurkan Kovack dan Rosentiel. Orientasi wartawan media berparadigma ruang publik atau media bertanggungjawab sosial perlu mengarah pada elemen-elemen jurnalisme tersebut.

Sumber orientasi wartawan dapat dikatakan kepada sembilan elemen jurnalisme yang terdiri dari: (1) Kewajiban pertama Jurnalisme adalah pada kebenaran. (2) Loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada masyarakat. (3) Intisari jurnalisme adalah disiplin verifikasi. (4) Praktisi jurnalisme harus menjaga

independensi terhadap sumber berita. (5) Jurnalisme harus menjadi pemantau kekuasaan. (6) Jurnalisme harus menyediakan forum kritik maupun dukungan masyarakat. (7) Jurnalisme harus berupaya keras untuk membuat hal yang penting menarik dan relevan. (8) Jurnalisme harus menyiarkan berita komprehensif dan proporsional. Dan elemen jurnalisme ke (9) bahwa praktisi jurnalisme harus diperbolehkan mengikuti nurani mereka (Kovack, 2006). Dari elemen-elemen jurnalisme itu, maka yang paling penting bahwa jurnalisme mengungkapkan kebenaran dalam beritanya, obyektif, kontrol pada kekuasaan dan sebagai ruang publik.

Orientasi wartawan yang menjalankan peran media dengan paradigma ruang publik atau media dari teori pers bertanggungjawab sosial, bertumpu dari landasan elemen-elemen jurnalisme dan kode etik jurnalistik yang secara normative dipahami wartawan dengan baik. Dibandingkan dengan orientasi wartawan dari media berparadigma komersial yang informasinya dikemas untuk memenuhi tuntutan pasar.

B. Konsep Kebebasan Pers

Kebebasan pers merupakan bagian dari konsepsi demokrasi Barat. Negara-negara demokrasi di dunia, makin banyak yang memberikan ruang bagi tumbuhnya kebebasan pers. Ada hubungan antara kebebasan pers (dapat dibaca sebagai media yang bebas) dan demokrasi. Hal ini nampak jelas bahwa pada

umumnya Negara-negara yang demokratis juga memiliki pers yang bebas. Pertanyaannya, apakah media bebas (adanya kebebasan pers) yang menumbuhkan demokrasi, atau demokrasi yang mengembangkan media bebas?. Tinjauan ini hanya ingin menunjukkan bahwa korelasi antara kebebasan pers dan demokrasi cukup signifikan.

Bagaimana konsep kebebasan pers sesungguhnya? Menurut Robert L Stevenson dalam artikelnya berjudul “*Freedom of the Press Around the World*” pada buku *Global Journalism* (1995: 63-67), baik disuatu Negara maupun diantara Negara-negara di dunia masih sering terjadi perbedaan persepsi dan pemaknaan terhadap konsep kebebasan pers dan siapa pemilik kebebasan pers. Dibanyak Negara di dunia, kebebasan pers masih belum menjadi komoditas dan tujuan di bagian besar Negara-negara demokrasi berbasis pasar barat setelah runtuhnya komunisme.

Konsep kebebasan pers, tampaknya tidak mempunyai definisi atau batasan yang jelas. Kebebasan pers lebih dapat dipahami bila dioperasionalkan dalam pengertian praktik kebebasanpers dalam suatu Negara atau di banyak Negara di dunia.

Namun demikian, konsep kebebasan pers dapat dirunut dari teori normative media (*normative theories of media*). Teori normative media mengasumsikan bagaimana seharusnya media tersebut berperan dalam realita sosial atau bagaimana sebenarnya

media berfungsi, bilamana serangkaian nilai sosial ingin diterapkan dan dicapai sesuai dengan sifat dasar nilai-nilai tersebut. Jenis teori normatif media ini berperan dalam membentuk institusi media, harapan publik terhadap media, bagaimana media harus memainkan peran secara esensial.

Teori normative media mempetakan atau mempolakan empat kategori sistem media berdasarkan pemikiran ilmiah bukan dari hasil riset lapangan. Untuk menguji teori normative media dapat dibandingkan dengan bagaimana pelaksanaan kebebasan pers dalam suatu negara. Dengan demikian, dari literature ilmu komunikasi, teori normative media berasal dari pengamatan, bukan dari hasil uji dan pembuatan hipotesis dengan menggunakan metode ilmu sosial .

Teori normative media bermula dari pemikiran Siebert, Peterson dan Schramm tahun 1956 yang dituangkan dalam bukunya “Empat Teori Pers”. Yaitu teori pers otoriter, libertarian, teori pers bertanggung jawab sosial dan teori pers komunis Soviet.

Teori pers otoriter, diakui sebagai teori pers paling tua, berasal dari abad ke-16, berasal dari falsafah kenegaraan yang membela kekuasaan absolut. Penetapan tentang “hal-hal yang benar” dipercayakan hanya kepada segelintir “orang bijaksana” yang mampu memimpin. Jadi, pada dasarnya, pendekatan dilakukan dari atas ke bawah. Pers harus mendukung kebijakan pemerintah dan mengabdikan kepada negara. Para penerbit diawasi

melalui paten-paten, izin-izin terbit dan sensor. Konsep ini menetapkan pola asli bagi sebagian besar sistem pers negara-negara di dunia, dan masih bertahan sampai sekarang. Sebagian besar dunia selama beberapa periode telah menerima prinsip-prinsip dasar otoritarianisme sebagai pedoman tindakan-tindakan sosial, dan telah dipakai dalam pengawasan, pengaturan dan penggunaan media komunikasi massa. Walaupun teori otoriter telah dibuang di banyak negara demokratis, tetapi praktik-praktik otoritarian cenderung mempengaruhi proses demokrasi. Bahkan, praktik otoritarian hampir memaksa pemerintah libertarian mengambil langkah-langkah balasan beberapa aspek tidak dapat dibedakan dengan cara-cara otoritarian.

Teori pers kedua, yaitu teori pers libertarian atau teori pers bebas. Teori ini mencapai puncaknya pada abad ke 19, yaitu manusia dipandang sebagai makhluk rasional yang dapat membedakan antara yang benar dan tidak benar. Pers harus menjadi mitra dalam upaya pencarian kebenaran. Kemudian berkembang pandangan dalam teori ini, pers perlu mengawasi pemerintah. Dari sini atribut pers sebagai the fourth estate setelah kekuasaan eksekutif, legislative dan yudikatif menjadi umum diterima dalam teori pers libertarian. Oleh karenanya, pers harus bebas dari pengaruh dan kendali pemerintah. Dalam upaya mencari kebenaran, semua gagasan harus memiliki kesempatan yang sama untuk dikembangkan, sehingga yang benar dan dapat dipercaya akan bertahan, sedangkan yang sebaliknya akan lenyap.

Teori ini paling banyak memberi landasan kebebasan yang tak terbatas kepada pers.

Disini pers bebas paling banyak memberi informasi dan hiburan; namun pers bebas juga paling sedikit berbuat kebajikan menurut ukuran umum dan sedikit mengadakan kontrol terhadap pemerintah. Dalam perusahaan pers yang menganut teori pers bebas, sebagian besar aturan yang ada hanyalah untuk menciptakan keuntungan berupa materi bagi pemilik modal. Pers jenis ini cenderung kurang tertarik pada soal-soal bagi kepentingan masyarakat.

Dua teori lainnya, *social responsibility theory* (teori pers bertanggungjawab social) dan *Soviet communist theory* (teori pers komunis Soviet) dipandang sebagai modifikasi yang diturunkan dari kedua teori sebelumnya. Teori pers bertanggungjawab social dijabarkan berdasarkan asumsi bahwa prinsip-prinsip teori pers libertarian terlalu menyederhanakan persoalan. Dalam pers bebas, para pemilik dan para operator pers yang terutama menentukan fakta-fakta apa saja yang boleh disiarkan kepada publik (fungsi *gatekeeper*) dan dalam versi apa (fungsi *framing* berita).

Teori pers libertarian tidak berhasil memahami masalah-masalah proses kebebasan internal dan proses konsentrasi pers. Teori pers bertanggungjawab social yang ingin mengatasi kontradiksi antara kebebasan media massa dan tanggungjawab social. Rumusan ini dimuat dalam laporan *Commission on the*

Freedom, 1949, dengan ketua Robert Hutchins. Dalam realitasnya, teori tanggung jawab sosial mencerminkan pendapat bahwa pers yang bebas dari kontrol pemerintah harus melayani kepentingan masyarakat dan tidaklah sama sekali bebas mempublikasikan informasi hanya untuk memenuhi kepentingan penerbit dan pemilik/ pengelola media semata-mata (Siebert, Paterson, 1988).

Denis McQuail menambahkan dua teori pers lagi, yaitu teori pers pembangunan dan teori pers partisipan demokratis. Teori pers pembangunan oleh McQuail dikaitkan dengan negara-negara dunia ketiga yang tidak memiliki ciri-ciri system komunikasi yang sudah maju. Pada tahun 1967, dengan berdirinya *Press Foundation of Asia* menawarkan konsep jurnalisme pembangunan yang mendapat sambutan bagi negara-negara berkembang. Unsur positif dari pers pembangunan, bahwa pers harus digunakan secara positif dalam pembangunan nasional, untuk otonomi dan identitas kebudayaan nasional.

Teori pers partisipan demokratis lahir pada masyarakat liberal yang sudah maju. Ia lahir sebagai reaksi atas komersialisasi dan monopolisasi media yang dimiliki swasta dan sentralisme dari birokratisasi institusi-institusi siaran publik yang timbul dari tuntutan norma tanggungjawab sosial. (McQuail, 1991:121). Inti dari teori partisipan demokratis terletak pada kebutuhan-kebutuhan, kepentingan dan aspirasi pihak penerima pesan komunikasi dalam masyarakat politis. Teori ini menyukai

kesebaragaman, skala kecil, lokalitas, *de-institusionalisasi*, kesederajatan dalam masyarakat dan interaksi.

Kemudian, ada versi konsep normative yang lebih sederhana yang dikemukakan Altschull (dalam McQuail, 1991: 122), yang menyebutkan tiga bentuk dasar system pers. Yaitu: (1) Sistem “pasar” dikaitkan dengan Dunia Pertama (kapitalis-liberal); (2) Sistem Marxis dikaitkan dengan Dunia Kedua (sosialis-Soviet), (3) Sistem “berkembang” yang dikaitkan dengan Dunia Ketiga (negara-negara sedang berkembang).

Sistem pertama merupakan gabungan dari unsur pers bebas dengan unsur tanggungjawab sosial. Sistem kedua merupakan model Soviet, dan sistem ketiga mewakili teori pembangunan (perkembangan). Ketiga system memiliki beberapa persamaan, namun Altschull menegaskan bahwa masing-masing sistem itu memiliki konsep dan tanggungjawab pers yang berbeda.

Pandangan teori pasar terhadap kebebasan sangatlah berbeda, terutama dalam hal definisi kebebasan yang mengandung makna negatif (tidak adanya kontrol atau kebijakan pemerintah). Berbeda dengan kedua teori lainnya, teori pasar memandang tanggungjawab sebagai sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban memberikan informasi nonpolitis atau walaupun bersifat politis penerapannya haruslah adil (tidak memihak). Teori berkembang memiliki cirri khas tersendiri, yakni perhatiannya dalam upaya mempersatukan masyarakat,

bukanlah memecahbelah masyarakat. Dan Altschull mengingatkan akan keterbatasan teori normative dalam menggambarkan kenyataan, terutama bagi mereka yang melakukan kontrol dan bekerja di media.

Konsep kebebasan pers sangat tergantung pada sistim politik dimana pers itu berada. Dalam negara komunis atau otoriter, kebebasan pers dikembangkan untuk membentuk opini pers yang mendukung penguasa. Sedangkan dalam negara liberal atau demokrasi, kebebasan pers pada prinsipnya diarahkan untuk menuju masyarakat yang sehat, bebas berpendapat dan berdemokrasi.

Kajian peran media dari perspektif kebebasan pers yang secara mikro menganalisis orientasi wartawan sebagai pelaku kebebasan pers, tampaknya menarik untuk dijadikan obyek studi. Bahkan secara lebih tegas, tuntutan orientasi wartawan dalam media dari sumber media publik atau dari sumber media komersial, akan menjadi proses penentuan orientasi bagi wartawan.

James Pardede (2009), telah menjadikan beberapa faktor dalam kinerja wartawan sebagai suatu fenomena yang menarik dan nyata. Peliknya tugas wartawan dalam mencari dan menyediakan berita yang baik, keterbatasan pendidikan dan pengalaman jurnalistik, tekanan pemilik media, tuntutan berita yang proporsional, kebebasan pers, dan persaingan antar media membuat kinerja wartawan belum memenuhi tuntutan kode etik

jurnalistik. Disini kinerja wartawan yang sesuai dengan standard kode etik jurnalistik harus dibangun dan ditingkatkan. Dalam disertasi berjudul "Pengaruh Persepsi atas Kebebasan Pers, Motivasi Berprestasi, Pengembangan Diri, dan Pengambilan Keputusan Terhadap Kinerja Wartawan-Wartawan Media Cetak di Kota-kota Besar di Indonesia", berkesimpulan, bahwa peningkatan persepsi atas kebebasan pers, motivasi berprestasi, dan pengembangan diri yang berorientasi pada peningkatan pengambilan keputusan, akan meningkatkan kinerja dan lebih lanjut peningkatan kemampuan pengambilan keputusan akan meningkatkan kinerja wartawan.

Kemudian disarankan, terhadap persepsi atas kebebasan pers, yaitu diperlukan upaya memperbaiki persepsi atas kebebasan pers, dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran wartawan akan kode etik jurnalistik menyangkut kebebasan pers. Metodenya melalui berbagai pelatihan, seminar, forum dan penugasan. Dengan pemahaman dan pengetahuan yang luas dan benar tentang kebebasan pers dan penerapannya di lapangan, wartawan akan mampu membuat keputusan yang benar dalam mencari, mengolah, dan menyajikan pemberitaan. Untuk penyelenggaraan training dalam mengembangkan diri, khususnya dalam mempersepsikan etika kebebasan pers, perusahaan harus menganggarkan atau menyediakan dana pelatihan secara rutin dan berkesinambungan. Dengan demikian,

persepsi yang benar terhadap kebebasan pers akan meningkatkan kinerja wartawan.

Sementara itu, fenomena media komersial juga sudah banyak menggeser fungsi-fungsi normative dari media. Media komersial tidak dominan lagi menyajikan informasi publik, yaitu jenis informasi yang dibutuhkan publik dengan realitas yang ditangkap media secara obyektif dan netral. Media komersial masih diharapkan untuk tidak partial mengkonstruksi realitas tersebut dalam format informasinya. Bila media komersial makin mengemas informasi dalam takaran komodifikasi berita, maka media komersial tidak serius memperhatikan kebutuhan publik melalui penyajian informasi publik yang netral dan obyektif. Paham neo-liberal telah mempengaruhi praktik jurnalisme yang dijalankan pers. Neo-liberal mengubah pers yang awalnya lebih berorientasi kepada kepentingan publik atau pembaca sebagai warga negara menjadi pembaca sekedar sebagai konsumen seperti dalam konsep *market-driven journalism* (Puji Rianto, 2008: 76). Paham *neo-liberal* telah mempengaruhi media yang berdampak pada penyajian informasi yang menjadikan informasi sebagai komoditas saja. Penyajian berita dan liputan media diukur dalam pengertain untuk kepentingan khalayak (melayani pasar) dan target tertentu.

C. Perubahan Praktik Jurnalisme di Era Digital

Sejak teknologi informasi Internet dikenal dalam masyarakat sekitar tahun 1990-an yang lalu dan dimanfaatkan juga dikalangan media massa, maka dewasa ini mulai tampak dampaknya. Jurnalisme yang dipraktikkan oleh media konvensional, seperti media cetak surat kabar, media radio maupun media penyiaran televisi, sudah mulai ketinggalan zaman. Dari sisi teknologi komunikasi melalui Internet, distribusi berita dapat dilakukan dengan cepat, bahkan real time diterima khalayak dalam media portal berita *online*. Konsep atau definisi berita juga dapat mulai berubah. Definisi sebuah berita ,yang sebelumnya bermakna ”melaporkan peristiwa yang telah terjadi”, kini berganti makna dengan ”melaporkan peristiwa yang sedang terjadi” (Ignatius Haryanto, 2014:3). Betapa dahsyat revolusi teknologi informasi ini. Dengan demikian, proses distribusi berita telah mengalami perubahan cepat dan dapat diterima khalayak dengan cepat pula. Teknologi komunikasi melalui Internet telah mampu mengirimkan berita hingga ke pelosok daerah atau tempat dimana saja, selama tempat itu diterpa jaringan Internet. Konsep jurnalisme yang konvensional mulai ditambah dengan unsur-unsur yang melibatkan fungsi teknologi komunikasi dengan basis Internet. Jurnalisme telah menghadapi tantangan yang dapat dikatakan sebagai suatu peluang sekaligus perlu berupaya bertransformasi dalam era digital.

Perkembangan Internet yang makin kuat telah memaksa jurnalisme sebagai sebuah industri dan profesi mengalami perubahan dan berdampak pada segala aspek. Cara kerja jurnalistik yaitu jurnalis yang melakukan aktifitas mencari, mengolah dan menyiarkan berita telah berubah di era digital ini, mulai dari praktik, norma dan organisasi hingga tujuannya. Riset yang dilakukan *Reuters Institute for Study of Journalism (RISJ)* yang bekerja sama dengan *Green Templeton College Future of Work Programme* ([https://www.kompasiana.com/vattayazahra5908/...](https://www.kompasiana.com/vattayazahra5908/)) menemukan bahwa perubahan-perubahan tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap tenaga kerja jurnalis, baik bagi mereka yang memilih untuk bekerja secara “tradisional”, atau bagi mereka yang bekerja sebagai jurnalis lepas atau pengusaha dalam bidang jurnalistik. Sekarang penerimaan tenaga kerja di bidang jurnalistik lebih fleksibel, tetapi semakin sulit karena calon pekerja dituntut untuk memiliki keahlian yang berbeda-beda disertai dengan resiko dan *reward* yang berbeda-beda pula.

Media yang menuju pada proses konvergensi multi-skilling, penyatuan konten jurnalistik ke dalam jaringan digital, dan hubungan antara produsen dan konsumen, merupakan tantangan terbesar untuk jurnalisme pada saat ini. Konsultasi dan entrepreneurship menjadi bagian dari pekerjaan jurnalistik. Artinya, konten berita yang bakal dicari dan dimuat menjadi pertimbangan apakah memenuhi target pasar atau tidak.

Jurnalisme saat ini mengalami perubahan menjadi jurnalisme yang interaktif dengan audiens yang lebih aktif sebagai komentator, pengawas, bahkan pembuat konten. Cara pengumpulan berita saat ini juga mengalami perubahan, diantaranya menjadi: (1) *curative journalism* yaitu pengumpulan berita yang diperoleh dari sumber lain dan diolah yang dikumpulkan ke dalam satu tempat; (2) *hyperlocalisation journalism* yaitu pelaporan berita dari daerah tertentu sehingga masyarakat juga dapat menulis berita. Hal itu dikenal sebagai *citizen journalism*.

Dalam perkembangan transformasi gaya penulisan berita juga mengalami perubahan, diantaranya: (1) jurnalisme opini, yaitu gaya penulisan subyektif terhadap suatu isu; (2) jurnalisme kolaborasi, yaitu penggabungan atau pengumpulan informasi oleh lebih dari satu orang dan disusun sehingga menghasilkan sebuah berita; (3) jurnalisme sindikat yaitu sebuah berita yang dipublikasikan dari sebuah agensi; (4) jurnalisme lapdog yaitu jurnalis yang lebih mendukung pemerintah. Jenis jurnalisme ini bertentangan dengan tujuan awal jurnalisme yaitu sebagai kritik pemerintah (*watchdog journalism*).

Perkembangan Internet yang makin kuat telah menjadikan jurnalisme mengalami perubahan yang cukup mendasar, yaitu muncul konten-konten yang telah disesuaikan dengan selera audiens, misalnya *Yahoo!* dan *Google* yang

membuat halaman depan situs yang berbeda-beda, tergantung dari preferensi dan history dari orang yang menggunakannya.

Konsep jurnalisme konvensional masih bertumpu pada rumusan pola 5 W dan 1 H, yang masih dilakukan ketika jurnalis membuat berita. Namun dewasa ini dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang makin pesat, maka Internet sebagai bentuk perkembangan itu telah dapat menampilkan diri sebagai suatu bentuk media baru (*new media*) dengan penyajian berita yang makin beragam dan cepat penyebarannya. Meskipun dengan pola yang masih sama, sebab merupakan pola baku untuk membuat suatu berita (5 W dan 1 H), hanya saja kecepatan penyebarannya yang unggul. Namun konsep jurnalisme itu mungkin dapat dirumuskan, yang sebelumnya bermakna “*melaporkan peristiwa yang telah terjadi*” kini berganti makna dengan “*melaporkan peristiwa yang sedang terjadi*” (Haryanto, 2014). Konsep berita yang mulai bergeser ini, sebagai intervensi dari keunggulan Internet yang dapat menyebarkan dalam seketika suatu berita yang sedang terjadi di suatu lokasi kejadian.

Media dalam perspektif kebebasan pers akan bertumpu pada orientasi politik pemberitaan yang dianut. Dalam teori sistem pers di dunia, terdapat empat model sistem pers, dan salah satu sistem pers akan dianut dan dijalankan oleh media. Di Indonesia sistem pers yang dijalankan sejak memasuki era Reformasi adalah berbentuk sistem pers libertarian. Artinya, pers

bebas menyajikan berita sepanjang mematuhi ketentuan kode etik jurnalistik dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pemberitaan yang berkembang kemudian, ada media yang lebih memberitakan secara komersial dan kemudian ada pula media dengan pola pemberitaan publik. Namun analisis terhadap model pemberitaan ini masih banyak faktor yang perlu dibahas dan dilihat. Kebebasan pers akhir-akhir ini cenderung dibatasi oleh peran pemilik modal untuk mengarahkan kebijakan pemberitaannya yang lebih cenderung komersial. Sementara publik selalu membutuhkan informasi yang terkait dengan kepentingan publik. Dan pemberitaan yang lebih mementingkan pemberitaan publik kemungkinan tidak sepenuhnya dilakukan oleh media, namun bervariasi dengan pemberitaan yang bersifat komersial.

Era digital dewasa ini menambah keunggulan media untuk menyajikan pemberitaan yang komersial. Sebab penyebaran melalui media digital atau media online, dalam pengaturan Dewan Pers merupakan media siber dengan portal berita yang telah diverifikasi dan legal. Sehingga beritanya dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Konsep jurnalismenya juga mulai berubah mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yaitu Internet yang dapat menyebarkan informasi dengan seketika atau real time. Ini merupakan dinamika yang paling mutakhir dalam perkembangan jurnalisme media.

Dalam era digital dewasa ini, jurnalis bertumpu kerjanya pada kode etik jurnalistik dan UU Pers yang berlaku sehingga dapat menyajikan berita yang berimbang antara perspektif media komersial dengan media yang mengutamakan kepentingan publik.

III. PENUTUP

Perkembangan media di Indonesia telah melalui suatu perjalanan sejarah yang panjang. Dalam arti tiap periode suatu masa pemerintahan dari masa Hindia Belanda, pendudukan Jepang, masa kemerdekaan Indonesia telah mempunyai tonggak paradigma media tertentu, yaitu paradigma otoritarian. Hingga pada masa pemerintahan masa merdeka yaitu masa Presiden Soekarno (Orde Lama) dengan paradigma media liberal. Pada masa Orde Baru dapat dipandang media berparadigma otoritarian. Yang kemudian bersambung dalam masa era Reformasi yang banyak memberikan peluang kebebasan bagi pers. Corak media yang berkembang dalam era Reformasi adalah pers liberal. Jurnalisme yang dipakai dalam tiap periode juga berbeda, dalam arti jurnalisme yang memberi semangat untuk membentuk suatu bangsa dipakai pada masa Hindia Belanda maupun pendudukan Jepang. Dilanjutkan pada masa kemerdekaan, dengan jurnalisme yang menyebarkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan Indonesia.

Wartawan yang menyajikan berita juga berperan penting untuk menentukan paradigma media dimana wartawan tersebut bekerja dengan jurnalisme yang sesuai dengan masa periode media beroperasi. Framing berita dapat memberikan ciri dan gaya media berparadigma. Bila media berorientasi pada berita-berita nasional, seperti surat kabar Kompas, dapat dimaknai media berparadigma *social responsibility press*. Sedangkan media yang banyak memuat berita sensasi, lebih cenderung pada paradigma liberal.

Posisi wartawan berada dalam persimpangan antara media berorientasi publik dengan media yang berorientasi atau berparadigma komersial yang berfokus pada berita-berita sensasi atau komersial, maka pilihan wartawan ditentukan oleh hati nuraninya dan kode etik wartawan yang diyakininya. Serta dasar regulasi dari UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers yang mengatur tugas dan fungsi serta peran media nasional, yang mendudukan media nasional sebagai media dengan peran strategis untuk mendorong kemajuan pembangunan bangsa. Di Indonesia, posisi wartawan berada dalam persimpangan antara dua paradigma media tersebut (media publik dan media komersial) tidak terlalu jelas. Dalam arti tidak semua atau satu media terlalu komersial tanpa memperhatikan kepentingan publik. Demikian pula sebaliknya, tidak semua media berparadigma publik, tanpa unsur komersial. Demikian posisi wartawan dalam suatu media dalam konteks di Indonesia.

Media berparadigma publik yang tidak selalu mengejar komersial, tentunya mengalami kondisi yang sulit dan menantang untuk dapat eksis dalam masyarakat. Ujian berat dialami wartawannya dari godaan kepentingan politik yang tidak sejalan dengan politik media publik. Namun sebaliknya, media berparadigma komersial, juga dituntut tanggungjawab sosialnya untuk menyajikan berita-berita bagi kepentingan publik, yang tidak dapat memandang publik sebagai obyek pemberitaan komersial saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto,Elvinaro. 2004. *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*.Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Batmomolin, Lukas dan Fransisca Hermawan (2003), *Budaya Media: Bagaimana Pesona Media Elektronik Memperdaya Anda*. Flores-NTT: Nusa Indah.
- Craner, Lorne W. 2006. "Mewujudkan Media Yang Bebas dan Bertanggungjawab: Suatu Bagian Integral Kebijakan Luar Negeri AS", dalam *Mencari Media Yang Bebas dan Bertanggungjawab*.Jakarta: ISAI dan Kedutaan Besar AS.
- Gayatri,Gati. 2006. "Profesionalisme Wartawan dalam Praktik Kemerdekaan Pers dan Demokrasi", *Jurnal Kommti*, Vol.10,No.20/ Desember 2006. Hlm 1-26.
- Haryanto,Ignatius. 2014. *Jurnalisme Era Digital-Tantangan Industri Media Abad 21*. Jakarta:Penerbit Buku Kompas.
- Kovach, Bill dan Tom Rosenstiel. 2006. *Sembilan Elemen Jurnalisme*, terjemahan Yusi A.Pareanom. Jakarta: Yayasan Pantau.
- Lister, Martin (et.al). 2009. *New Media: A Critical Introduction*. London and New York: Routledge.
- Mowlana,Hamid. 1993. "Perbandingan Sistem Media" dalam *Komunikasi Internasional* oleh Dedy Djamaluddin Malik,Jalaluddin Rakhmat dan M.Shoelhi (eds). Bandung: LP3K dan Remaja Rosdakarya. Hlm 37-65.
- McQuail, Denis. 1991. *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, Edisi Kedua, Jakarta: Erlangga.
- Pardede, James. 2009. "Pengaruh Persepsi atas Kebebasan Pers, Motivasi Berpretasi, Pengembangan Diri dan Pengambilan Keputusan terhadap Kinerja Wartawan-Wartawan Media Cetak di Kota-kota Besar di Indonesia", Sinopsi Disertasi, Program Pascasarjana,Universitas Negeri Jakarta.
- Rahardjo,Turnomo. 2011. Isu-isu Teoritis Media Sosial.Dalam Junaedi,Fajar Ed. *Komunikasi 2.0 Teoritis dan Implikasi*. Yogyakarta: Mata Padi Pressindo.

- Rianto, Puji. 2008. *Jurnalisme dalam Tatanan Neoliberal dan Krisis Demokrasi', dalam Media, Komunikasi dan Politik Sebuah Kajian Kritis*, oleh I Gusti Ngurah Putra (Ed). Yogyakarta: FISIPOL UGM. Hlm 61-81.
- Romli, Asep Syamsul. 2012. *Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Sen, Krishna dan David T.Hill. 2001. *Media Budaya dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi dan PT Media Lintas Inti Nusantara.
- Stevenson, Robert L. "Freedom of the Press Around the World" dalam John C. Merrill. (Ed). *Global Journalism-Survey of International Communication*. Third Ed. White Plains, N.Y.: Longman. 1995 Halaman 63-67.
- Siebert, Fred.S, T.Peterson dan W.Schramm. 1986. *Empat Teori Pers*, Alihbahasa Putu Laxman S.Pendit, Jakarta: Intermedia
- _____ Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.